



## KEMBALI KE MASA DEPAN: Kepentingan Baru dalam Pasar Karbon Hutan, Proses Kebijakan Kehutanan Internasional dan Relevansinya dengan FORCLIME

### ARTIKEL LAINNYA

**PELATIHAN DASAR PENGEMBANGAN USAHA** bagi pendamping KPH dan KTH di Sulawesi Tengah

**KOORDINASI DINAS LHK KALIMANTAN BARAT DENGAN DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM, KLHK** terkait Perkembangan Persiapan Proyek GCF

**KPH DI SULAWESI TENGAH** susun rencana pengelolaan hutan

**KONSULTASI PUBLIK** Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua 2023-2042

### Editorial

Beberapa bulan terakhir ini didominasi oleh banyak kegiatan di tingkat internasional yang relevan untuk Indonesia dan untuk FORCLIME. Beberapa negara donor seperti Norwegia, Inggris dan Amerika Serikat menyusun dan memperkuat kerja sama mereka dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jerman juga mengubah pendekatannya dan untuk pertama kalinya melakukan dialog kebijakan tingkat tinggi langsung dengan KLHK di Manggala Wanabakti, bukan seperti biasanya melalui putaran besar di Bappenas. Delegasi tingkat tinggi dari BMZ dan BMUB diterima oleh Wakil Menteri, Dr. Alue Dohong, dan berdiskusi yang bermanfaat tentang masa depan kerja sama pembangunan Indonesia-Jerman di bidang kehutanan. Kepentingan bersama yang dibahas dalam diskusi tersebut termasuk dukungan terhadap perhutanan sosial, bekerja pada mekanisme insentif untuk



pengelolaan hutan lestari dan digitalisasi. Pada kesempatan ini, *topping up* untuk program FORCLIME *Reloaded* dan dukungan tambahan untuk pengelolaan gambut dan mangrove juga diformalkan. Kami menantikan misi penilaian (*appraisal mission*) yang akan tiba pada bulan September tahun ini untuk berdiskusi dengan mitra FORCLIME di tingkat nasional dan tingkat lokal tentang kelanjutan FORCLIME untuk tahun 2025-2028. Kami memperkirakan bahwa FORCLIME akan berkontribusi pada strategi FOLU Net Sink 2030 sebagai panduan rencana operasional di tahun-tahun mendatang dan mempertahankan pendekatan multi-level, bekerja sama dengan mitra kami Biro Perencanaan (Birocan) dan direktorat terkait lainnya serta otoritas provinsi di Indonesia Timur. Ini akan menjadi waktu yang sibuk untuk memastikan masa depan kerja sama yang sukses dalam proyek kami, saya sangat menantikannya.

**Georg Buchholz**  
Direktur Program FORCLIME

# Kembali ke Masa Depan: Kepentingan Baru dalam Pasar Karbon Hutan, Proses Kebijakan Kehutanan Internasional dan Relevansinya dengan FORCLIME

*Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME*

Tahun lalu penuh dengan acara-acara internasional yang mungkin akan melahirkan dinamika baru bagi pelestarian hutan di Indonesia. Yang terpenting, Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP 15) di Kunming-Montreal menyaksikan penerapan serangkaian tujuan internasional baru untuk konservasi keanekaragaman hayati global yang disebut “Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (GBF)”. Sebanyak 188 pemerintah menyetujui kerangka kerja tersebut dan berkomitmen untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati darat dan laut yang terus berlanjut. Kita dapat mengharapkan langkah-langkah tindak lanjut yang konkrit dari pemerintah kita untuk menerapkan kerangka kerja ini dan lebih memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati.

Selain itu, pada COP 27 di Mesir, Kemitraan Pemimpin Hutan dan Iklim (FCLP), sebuah kemitraan sukarela dari 27 negara yang berkomitmen untuk mempercepat momentum untuk menghentikan dan membalikkan (*reverse*) kehilangan hutan dan degradasi lahan pada

tahun 2030, diluncurkan pada tanggal 7 November 2022. Kemitraan ini terkait langsung dengan perkembangan terkini yang dapat kita amati di Indonesia, dengan penandatanganan MoU dengan Inggris, AS, dan negosiasi ulang *letter of intent* (LoI) Norwegia. Indonesia sedang mendiskusikan potensi keanggotaan dengan FCLP dan kami mengharapkan diskusi lebih lanjut dengan kemitraan ini. KLHK baru-baru ini mengumumkan ketersediaan 577 juta ton CO<sub>2</sub>eq dari skema Pembayaran Berbasis Hasil (*Results-based-Payment-RBP*) untuk pengurangan emisi bersejarah yang dicapai antara 2018-2020, yang telah diverifikasi oleh UNFCCC melalui Laporan Pembaruan Dua Tahunan ketiga di Indonesia (*Biennial Update Report-BUR*). KLHK juga menekankan bahwa setiap proyek karbon (hutan) harus tertanam dalam skema tata kelola karbon Indonesia dan dipertanggungjawabkan melalui *National Carbon Registry* (SRN – Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim). Diskusi internasional dan nasional ini mengingatkan kita pada diskusi awal tentang REDD+ sekitar 15 tahun yang lalu pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP

2



Delegasi tingkat tinggi dari BMZ dan BMUB diterima oleh Wakil Menteri, Dr. Alue Dohong

15) di Bali di mana REDD+ dimulai. Namun, penting untuk dicatat bahwa diskusi saat ini jauh lebih konkret. Pertama, karena sejak 2015, REDD+ merupakan bagian dari Perjanjian Paris, yang memungkinkan negara-negara memasukkan konservasi hutan sebagai strategi untuk mencapai target iklim (NDC) mereka. Kedua, RBP tersebut mengacu pada pengurangan emisi bersejarah, yang diverifikasi oleh UNFCCC. Ketiga, rencana konkret diajukan untuk melanjutkan jalur ini untuk netralitas karbon bersih dari sektor hutan dan penggunaan lahan hingga tahun 2030 yang diwujudkan dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. Diharapkan potensi pendapatan dari RBP disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengisi kesenjangan pembiayaan untuk rencana ambisius ini.

Kami mengamati dan berpartisipasi dalam penjabaran rencana operasional dan alokasi anggaran skema RBP Global Climate Fund (GCF) di provinsi mitra kami, seperti di Kalimantan Barat dan di Papua dan diharapkan bahwa "Mekanisme Pembagian Manfaat" yang dikembangkan ini muncul sebagai aliran pembiayaan untuk Implementasi FOLU Net Sink 2030 di masa depan. Skema RBP GCF saat ini tampaknya menjadi skema pembiayaan yang paling logis di tingkat nasional. Namun, skema Bank Dunia ini, bersama dengan proyek pasar karbon sukarela yang ada dari sektor swasta sedang "testing the waters" seberapa potensial karbon keseluruhan (domestik) pasar mungkin bermain keluar. Prosedur perlu dikembangkan dan keputusan harus dibuat untuk menentukan pengurangan emisi mana yang dapat diperdagangkan di pasar karbon domestik atau internasional yang sedang berkembang dan bagian mana dari ini yang diperhitungkan untuk tujuan iklim Indonesia. Fakta bahwa KLHK akan menjadi pintu gerbang unik untuk penghitungan karbon nasional dan memainkan peran kunci dalam membangun tata kelola karbon nasional dapat dilihat dalam instruksi tahun lalu

oleh Kementerian kepada pemerintah provinsi untuk tidak terlibat dalam negosiasi terkait kegiatan karbon hutan. Contoh lain adalah kasus proyek karbon RMU (Rimba Makmur Utama) yang terkenal di Kalimantan Tengah dan kasus proyek karbon hutan lainnya yang dilaporkan, yang mendesak untuk mendaftarkan kegiatan mereka di daftar karbon nasional (SRN) dan membayar penerimaan negara bukan pajak dan denda atas ketidakpatuhan. Perlu diingat bahwa pengurangan emisi dari deforestasi dan peningkatan stok karbon hutan melalui restorasi hutan akan berperan penting dalam mencapai NDC Indonesia. Pasar karbon domestik yang muncul (*voluntary & compliance*) juga akan berperan dalam hal ini, sementara aturan dan kerangka peraturan masih perlu diselesaikan. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan pertumbuhan Sektor Energi dan Transportasi menunjukkan perlunya pengurangan emisi di semua sektor untuk mencapai target iklim nasional. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana ini terkait dengan diskusi internasional di dalam dan di luar Kemitraan Pemimpin Hutan dan Iklim (FCLP) dan apakah kredit karbon hutan pada akhirnya akan diperdagangkan di bawah perjanjian iklim global saat ini. Diskusi yang sedang berlangsung tentang integritas kredit karbon dan standar karbon hutan internasional seperti ART/TREES serta negosiasi mengenai penetapan harga aset karbon hutan terkait langsung dengan hal ini.

Menariknya, pada tahun 2022, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo menandatangani Pernyataan Bersama tentang "kerja sama hutan tropis dan aksi iklim" pada KTT G20 di Bali dan memulai diskusi tri-nasional tentang inisiatif antara ketiga negara ini yang juga disebut "Forest-OPEC", mencari sinergi, dan memposisikan negara-negara kaya hutan ini dalam negosiasi internasional mendatang tentang REDD+ dan pasar karbon hutan dan akhirnya tentang harga unit karbon hutan



Dialog kebijakan tingkat tinggi langsung dengan KLHK di Manggala Wanabakti

### Jadi, apa artinya bagi FORCLIME dan mitra lokalnya?

Perkembangan dalam BPLDH memiliki kepentingan strategis, BPDH muncul sebagai mekanisme keuangan iklim internasional dan prosedurnya, pengaturan tata kelola, dan peraturannya sangat penting jika kita ingin memahami dan mendukung pembiayaan iklim internasional masa depan untuk perlindungan hutan. Fakta bahwa FORCLIME bertanggung jawab atas pengembangan proyek GCF dengan mitra kami Kalimantan Barat untuk proyek pengurangan emisi yurisdiksi sejalan dengan Rencana Operasional FOLU Net Sink membantu kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme keuangan ini dan memberikan wawasan yang berharga.

Prosedur untuk skema Pembayaran Berbasis Hasil GCF mungkin merupakan cetak biru untuk pembayaran internasional mendatang yang

mencapai tingkat provinsi. Proses konsultasi untuk mengembangkan proposal berkualitas tinggi akan membantu otoritas provinsi untuk mengakses dana tersebut di masa mendatang.

Mengembangkan kapasitas untuk mengikuti pedoman proposal dan merumuskan rencana anggaran untuk mengakses dana ini akan menjadi semakin penting. FORCLIME siap mendukung mitra kami dalam topik ini.

Kami akan mengikuti diskusi internasional yang sedang berlangsung dengan cermat dan akan mempertimbangkannya selama desain fase proyek mendatang kami "FORCLIME Reloaded" untuk memastikan bahwa dukungan yang tepat diberikan untuk memfasilitasi akses ke pendanaan iklim internasional di tingkat nasional tetapi juga untuk provinsi mitra kami untuk menerapkan strategi FOLU Net Sink dan pada akhirnya mencapai netralitas karbon sektor kehutanan pada tahun 2030.



Keuntungan bersama yang dibahas dalam diskusi tersebut termasuk dukungan terhadap perhutanan sosial, bekerja pada mekanisme insentif untuk pengelolaan hutan lestari dan digitalisasi.

### Artikel lainnya

## Pelatihan Dasar Pengembangan Usaha bagi pendamping KPH dan KTH di Sulawesi Tengah

Terkait dengan Program Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah, FORCLIME bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi, termasuk dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mengembangkan model pendampingan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan atau Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan oleh staf KPH, dan diarahkan agar KTH/KUPS/UMKM mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan usahanya bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

Agar staf KPH mempunyai kompetensi yang memadai dalam mendampingi dan mengembangkan usaha KTH/KUPS/UMKM, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama FORCLIME mengadakan Pelatihan Dasar Pengembangan Usaha pada tanggal 21 – 24 Februari 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan terkait cara mengembangkan usaha bagi kelompok tani hutan. Selama pelatihan peserta mendapat pengetahuan mengenai: (1) Mengelola Kelompok, (2) Mengembangkan gagasan usaha, (3) Analisis Rantai Nilai, (4) Survei



Pasar, (5) Model Bisnis Canvas, (6) Pemasaran, (7) Rencana Produksi, (8) Pembagian Tugas, (9) Perizinan Usaha, (10) Penyusunan rencana usaha. Pelatihan ini diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan (1 orang), 13 staf KPH (mewakili 13 KPH yang ada di Sulteng) dan 8 orang yang mewakili 6 Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Setelah pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan bimbingan (mentoring) pada bulan Maret hingga bulan April 2023, yang dilaksanakan secara daring. Dalam proses pembimbingan ini, tim pelatih akan memonitor kemajuan dan kendala yang dihadapi peserta dalam menyusun rencana usaha kelompok dampingannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Edy Marbyanto**, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
2. **M. Yusuf**, Advisor Junior bidang Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari

## Dinas LHK Kalimantan Barat Berkoordinasi dengan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK terkait Perkembangan Persiapan Proyek GCF

Dalam rangka melanjutkan proses penyusunan proposal dan studi kelayakan proyek pendanaan iklim kepada Green Climate Fund (GCF), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pertemuan dengan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Delegasi Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas LHK Bapak Ir H Adiyani, MH., dan diterima oleh Sekditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Sekditjen PPI), KLHK, Bapak Agus Rusli, SPI, M.Si., pada tanggal 24 Februari 2023 bertempat di ruang Rapat Sekditjen PPI, di Gedung Manggala Wanabakti.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Dinas LHK dengan Sekjen KLHK pada bulan Desember 2022 lalu, dan merupakan sarana komunikasi dan koordinasi terkait kondisi terkini proses persiapan proyek GCF. Selain itu, pertemuan tersebut

juga dimaksudkan untuk mendapatkan arahan berkenaan dengan tahapan dan langkah lanjut pelaksanaan proyek GCF di Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas LHK kembali menyampaikan komitmen Pemprov Kalimantan Barat melalui kontribusi proyek ini untuk mendukung program nasional terkait dengan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan NDC. Selain itu, juga disampaikan usulan kandidat mitra proyek yang akan bersama Pemprov Kalimantan Barat mengimplementasikan GCF, dan mengusulkan focal point untuk Proyek GCF pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Jumtani**, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
2. **Wandojo Siswanto**, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim



## KPH di Sulawesi Tengah Susun Rencana Pengelolaan Hutan

Sejak tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Proses ini dimulai dengan berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bulan Oktober 2022 untuk mendapatkan masukan-masukan terkait peran dan fungsi KPH serta regulasi terbaru sebagai panduan penyusunan RPHJP.

Pada bulan November 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengundang Unit Pengelola Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Sulawesi Tengah untuk berdiskusi mengenai rencana penyusunan RPHJP. Dari kegiatan ini, dibentuk Tim Revisi RPHJP yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh KPH, dan seluruh UPT KLHK di Sulawesi Tengah untuk berbagi data dan rencana program sebagai masukan dan arahan penyusunan RPHJP KPH. FORCLIME juga tergabung dalam tim ini. Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan Tim Revisi RPHJP untuk memaparkan kegiatan yang akan dilakukan serta ketersediaan data untuk dapat disinkronisasikan dengan RPHJP. Selama bulan Desember, dilaksanakan proses analisis data dan

penyusunan dokumen dan pada akhir tahun 2022, draf awal RPHJP di seluruh KPH telah tersedia.

Lokakarya dan *coaching clinic* untuk penyempurnaan RPHJP dilaksanakan pada tanggal 16-17 Maret 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas, Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP. Bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dan Libu Perempuan Sulawesi Tengah, FORCLIME memfasilitasi kegiatan lokakarya dan *coaching clinic* ini. Beberapa hal yang dibahas adalah terkait tata hutan dan pengarusutamaan gender dalam dokumen RPHJP. *Coaching clinic* akan terus berlangsung sampai dengan pertengahan bulan April dan harapannya dokumen RPHJP bisa difinalisasi setelahnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Muhammad Yusuf**, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
2. **Ismet Khaeruddin**, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah



# Konsultasi Publik Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua 2023-2042

Sejak tahun 2022, FORCLIME mendukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Proses tersebut diawali dengan *kick off meeting* yang diselenggarakan pada bulan November 2022, dan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan dan diskusi hingga awal tahun 2023.

Draf RKTP telah selesai disusun pada Maret 2023. Untuk mendapatkan masukan para pihak, DKLH Papua, didukung FORCLIME, mengadakan konsultasi publik pada tanggal 17 Maret 2023 di Kota Jayapura yang juga dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Papua, Suzana Wainggai, S.pd, M.SocSc, dan dihadiri oleh Kepala DKLH Provinsi Papua, Jan Jap L. Ormuseray S.H., M.Si, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Unit Pengelola Teknis (UPT) KLHK di Provinsi Papua, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CDLHK) di Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Bidang

Lingkungan dan Kehutanan, Lembaga Masyarakat Adat, serta perwakilan masyarakat adat dan mitra pembangunan di Papua.

Dalam sambutan pembukaannya, Ibu Suzana Wainggai menyampaikan: “Sesuai Visi 2100 Papua yang mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah emisi serta pendekatan budaya dan kearifan lokal, harus dipastikan komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata yang berdasar pada perencanaan kehutanan yang baik, salah satunya melalui RKTP”. Sambutan tersebut dilanjutkan dengan arahan dari Ir. Neni Supreni, M.Si dari Direktorat RPPWPH KLHK yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Rencana Makro Kehutanan, yang memberikan materi terkait RKTP bagi perencanaan nasional dan daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan draf dokumen RKTP dari tim penyusun untuk mendapatkan masukan dari peserta yang hadir. Kemudian para peserta memberikan kontribusi pemikiran sesuai kewenangan, Tupoksi dan tanggung jawab dari masing-masing institusi.

Dokumen ini selanjutnya akan difinalisasi berdasarkan masukan dari publik dan nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua.

#### Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Theodora F. Resubun**, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat



FORCLIME Forests and Climate Change Programme  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor  
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia  
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214  
Fax: +62 (0)21 572 0193  
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: [ratu.widyawati@giz.de](mailto:ratu.widyawati@giz.de)



Bekerja sama dengan:

